

STRATEGI MENINGKATKAN SISTEM KEAMANAN DI DAERAH PERBATASAN DENGAN JARINGAN LOGISTIK YANG TERINTEGRASI

Virgin Kristina Ayu¹, Winka Wino Yunanda² & Fiorentina Nulhakim³

Program Studi Industri Pertahanan, Fakultas Teknologi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia^{1,2,3}

Email: virgin.ayu@tp.idu.ac.id¹ winka.yunanda@tp.idu.ac.id² & fiorentina.nulhakim@tp.idu.ac.id³

Abstrak

Kawasan perbatasan merupakan daerah yang paling ujung suatu negara yang berdekatan dengan negara lain mengakibatkan wilayah perbatasan sangat rentan untuk berinteraksi dengan negara lain dan menimbulkan kekhawatiran akan lunturnya nilai-nilai nasionalisme masyarakat perbatasan Indonesia, selain itu kekhawatiran akan keamanan masyarakat yang rentan terhadap berbagai ancaman baik dari luar ataupun dari dalam negeri. Oleh karena itu maka perlunya strategi yang tepat dalam meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan. Dengan metode system thinking dan dianalisis dengan analisis SWOT maka perlu peranan moda jaringan logistik yang terintegrasi menggunakan konsep supply chain management yang berkolaborasi dengan berbagai pihak dan dukungan dukungan dari berbagai pihak dari pelaku hingga pengguna sehingga tercipta sistem yang tersinkronisasi dan profesional selain itu perlunya penanaman rasa nasionalisme yang perlu terus ditanamkan kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa cinta terhadap tanah air.

Kata Kunci : Kawasan perbatasan, jaringan logistik, system thinking

Abstract

The border area is the most extreme area of a country that is adjacent to other countries resulting in the border area being very vulnerable to interacting with other countries and raising concerns about the erosion of the values of nationalism of Indonesian border communities, in addition to concerns about the security of people who are vulnerable to various threats both from outside or from within the country. Therefore, it is necessary to have the right strategy in increasing security in the border area. With the system thinking method and analyzed with SWOT analysis, it is necessary to play an integrated logistics network mode using the concept of supply chain management in collaboration with various parties and support from various parties from actors to users so as to create a synchronized and professional system in addition to the need to instill a sense of nationalism which needs to be instilled in the whole community to always love the homeland.

Keywords: Border area, logistics network, system thinking



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Globalisasi telah membawa perubahan dalam kehidupan manusia sejak dimulai dari tahun 1960-an dan perubahannya bergerak begitu cepat seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi yang tidak dapat dipungkiri telah melibatkan setiap bangsa di dalamnya. Kondisi ini juga memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat yang berada di wilayah perbatasan, karena

dengan adanya teknologi komunikasi dan informasi, mampu meningkatkan tingkat berkomunikasi maupun bertukar informasi pada setiap individu dengan siapa saja dengan mudah di berbagai tempat.

Dengan kondisi seperti ini, masyarakat di wilayah perbatasan memiliki kemudahan untuk dapat berinteraksi dengan warga negara tetangga. Kondisi ini, dikhawatirkan dapat melemahkan nasionalisme dari masyarakat

Indonesia yang berada di perbatasan. Poespowardojo (2003:2)

Masalah yang terjadi di wilayah perbatasan negara menjadi salah satu persoalan penting bagi keamanan Indonesia, dengan adanya ancaman keamanan yang dapat datang kapan saja dan masuk dari luar wilayah perbatasan darat dan laut. Ancaman sengketa atas kepemilikan wilayah perbatasan NKRI tentunya perlu diatasi dari berbagai potensi yang mungkin terjadi dengan strategi perbatasan yang dimiliki Indonesia sebagai negara berdaulat.

Kekhawatiran yang terjadi di wilayah perbatasan yang sangat rentan untuk terus berinteraksi dengan negara tetangga, diperkuat dengan lemahnya integrasi logistik untuk menyokong perekonomian di wilayah perbatasan oleh pemerintah. Permasalahan ketertinggalan ekonomi menyebabkan tingginya tingkat kesenjangan pembangunan wilayah dibandingkan dengan wilayah lain.

Fenomena gangguan stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia akibat dari terjadinya ketimpangan sosial ekonomi di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia ini menyebabkan munculnya berbagai persoalan tertentu karena wilayah-wilayah di perbatasan kurang tersentuh oleh aktivitas ekonomi negara dan lemahnya kontrol negara atas wilayah diperbatasan. Kondisi permukiman yang jauh dari pusat perekonomian, yang hanya dapat di akses dengan moda transportasi tertentu yang masih terbatas, menyebabkan aliran logistik masyarakat terhambat.

Potensi lainnya adalah rentan adanya konflik yang mengganggu keamanan di wilayah perbatasan. Penentuan batas maritim Indonesia dan Malaysia di beberapa bagian wilayah perairan Selat Malaka sampai saat ini masih belum disepakati oleh kedua negara akibat dari masih tidak jelasnya batas maritim

Indonesia sehingga sering menimbulkan gesekan antara petugas maupun nelayan Indonesia dengan pihak Malaysia di lapangan. Selain itu perbatasan darat di Kalimantan, pada beberapa titik batas belum tuntas disepakati oleh kedua belah pihak melalui Forum General Border Committee (GBe) dan Joint Indonesia Malaysia Boundary Committee (JIMBC).

Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan utama negara sangat dibutuhkan dalam menghadapi ancaman yang terjadi khususnya di perbatasan. Dalam pelaksanaan tugasnya, TNI tentunya membutuhkan logistik sebagai pendukung pada operasi militer maupun operasi militer selain perang melalui dukungan pelayanan barang kepada satuan-satuan operasi, dan pelayanan pelayanan barang kepada satuan-satuan pengguna maupun masyarakat secara langsung.

Logistik yang dibutuhkan di perbatasan dapat berupa logistik militer yang digunakan untuk kepentingan militer prajurit TNI dan logistik sipil yang digunakan untuk masyarakat secara umum. Aktifitas logistik dapat berupa lokasi fasilitas, transportasi, inventarisasi, komunikasi, dan pengurusan serta penyimpanan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mawanto, A. (2020) dengan judul "Pengaruh Dukungan Logistik Terpadu di Wilayah Natuna terhadap Kesiapan Operasi KOGABWILHAN I" mendapatkan hasil berupa dukungan pembekalan atau dukungan logistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan operasi Kogabwilhan I. Nilai koefisien regresi bertanda positif yang diperoleh dalam penelitian berarti bahwa dengan meningkatnya dukungan pembekalan logistik semakin baik maka kesiapan operasi Kogabwilhan I juga semakin baik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh M. Yamin Jinca dan Andi Muliama mengenai Simpul Jaringan

Transportasi Logistik Di Kawasan Perbatasan Indonesia - Malaysia Di Kabupaten Nunukan menunjukkan bahwa strategi pengembangan sistem jaringan transportasi logistik perlu dilakukan dengan melakukan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan peluang pasar negara tetangga dengan didukung pembangunan infrastruktur transportasi, dan melakukan pengembangan pusat ekonomi perbatasan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

Dalam Perpres No 26 tahun 2012 menjelaskan Pengembangan Sistem Logistik Nasional merupakan pengintegrasian simpul-simpul infrastruktur logistik, baik simpul logistik (logistics node) maupun keterkaitan antar simpul logistik (logistics link) yang berfungsi untuk mengalirkan barang dari titik asal ke titik tujuan (Perpres 26, 2012).

Peraturan Presiden No 26 Tahun 2012 menjelaskan bahwa Visi Logistik Indonesia 2025 adalah "Terwujudnya Sistem Logistik yang terintegrasi secara lokal, terhubung secara global untuk meningkatkan daya saing nasional dan kesejahteraan rakyat (locally integrated, globally connected for national competitiveness and social welfare)".

Terintegrasi Secara Lokal (Locally Integrated), diartikan bahwa pada tahun 2025 seluruh aktivitas logistik di Indonesia mulai dari tingkat pedesaan, perkotaan, sampai dengan antar wilayah dan antar pulau beroperasi secara efektif dan efisien dan menjadi satu kesatuan yang terintegrasi secara nasional dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang akan membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia (Perpres 26, 2012).

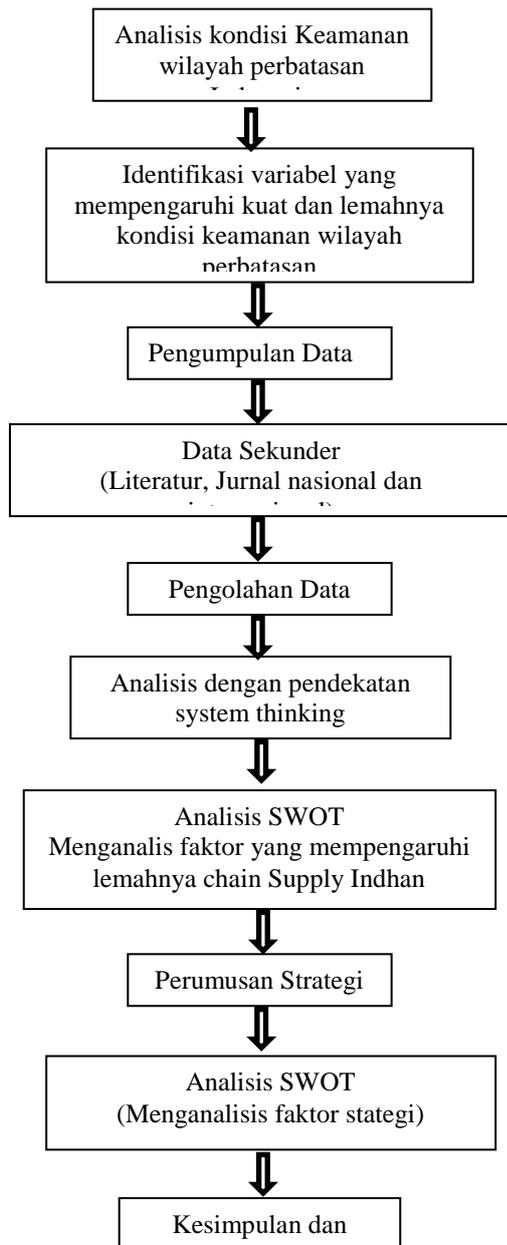
Saat ini kondisi sistem sarana dan prasarana di wilayah perbatasan Indonesia

belum merata dan belum terintegrasi dengan baik. Kinerja pelayanan sistem transportasi sangat dipengaruhi oleh integrasi dan keterpaduan jaringan dimana berbagai layanan transportasi harus ditata sedemikian rupa, sehingga terintegrasi dan memungkinkan sistem transfer yang menerus atau seamless (Susantono, 2007).

Berdasarkan latarbelakang tersebut maka dilakukan penelitian untuk dapat mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan lemahnya kemandirian wilayah perbatasan Indonesia dan untuk menentukan strategi yang tepat dalam menangani permasalahan tersebut. Dalam analisisnya digunakan metode system thinking yang berguna untuk menunjukkan hubungan dalam sistem sehingga menunjukkan posisi dari sebuah sistem di lingkungannya dengan sistem lain dan proses.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian berdasarkan tinjauan pustaka atau studi literatur. Tahapan penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan secara sekunder. Studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2003:3). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, surat kabar / media online, dan dokumen lainnya.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbatasan dengan 10 negara tetangga, terdiri dari perbatasan darat, dan laut. Indonesia berbatasan langsung dengan 3 negara tetangga pada wilayah daratan yaitu Papua Nugini, Malaysia, dan Timor Leste. Dengan empat provinsi perbatasan dan 15 kabupaten/kota yang memiliki karakteristik kawasan perbatasan berbeda-beda pada masing-masing wilayah. Di laut

berbatasan Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, Singapura, Thailand, Vietnam, Philipina, Australia, India, dan Palau yang ditandai dengan pulau-pulau terluar dan masih diperlukan penataan dan pengelolaan karena sebagian besar daerah perbatasan ini masih merupakan daerah yang tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi serta pertahanan dan keamanan yang masih sangat terbatas.

Wilayah yang berada di perbatasan yang merupakan daerah ujung wilayah negara memiliki peranan yang penting dalam menjaga kedaulatan negara dan keamanan masyarakat sehingga harus terus dijaga baik dari ancaman militer dan non militer. Pembangunan wilayah perbatasan tidak hanya difokuskan bagaimana daerah tersebut aman dari gangguan separatisme, wilayah kedaulatan negara tidak digerus oleh negara tetangga, terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsep keamanan tidak hanya difokuskan pada negara dan aspek teritorial, tapi juga pada individu-individu yang mestinya menjadi pusat perhatian. Orang harus merasa aman dalam segala aspek kehidupannya. Ancaman yang sering terjadi dan mengancam terhadap keamanan nasional dikelompokkan menjadi beberapa kategori (Buzan. 1991: 116-133)

- a. Ancaman militer yang merupakan prioritas tertinggi dan menjadi perhatian penting dalam keamanan nasional, hal ini dikarenakan ancaman militer dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang dapat memusnahkan apa yang telah di capai oleh manusia. Strategi pertahanan dalam menghadapi ancaman militer disesuaikan dengan sumber, bentuk, dan besarnya ancaman aktual yang mengancam Indonesia karena Ancaman militer yang datang tidak hanya bersifat langsung, tetapi juga dapat tidak langsung ditujukan

kepada negara itu, tetapi lebih kepada kepentingan-kepentingan eksternal yang ditujukan kepada negara itu. Serta disesuaikan dengan sumber, bentuk, dan besarnya ancaman aktual yang mengancam. Dalam menghadapi ancaman agresi, strategi yang digunakan melibatkan segenap kekuatan pertahanan secara total. Sedangkan penggunaan kekuatan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer bukan agresi, dilakukan sesuai dengan eskalasi ancaman dan tingkat risiko yang ditimbulkannya.

- b. Ancaman sosial berkenaan dengan keberlanjutan dari perubahan nilai, budaya, kebiasaan, identitas etnik. Ancaman terhadap keamanan nasional ini biasanya datang dari dalam negeri dan terbagi menjadi ancaman fisik berupa kematian, dan kesakitan, ancaman ekonomi berupa pengrusakan hak milik, terbatasnya akses lapangan kerja, ancaman terhadap hak-hak (pembatasan hak-hak kebebasan sipil), serta ancaman terhadap posisi atau status seseorang dengan cara penurunan pangkat, dan penghinaan di depan publik.
- c. Ancaman politik yang ditujukan kepada stabilitas kinerja institusi negara dengan tujuan untuk menekan pemerintah lewat kebijakan-kebijakan tertentu, penggulingan pemerintahan, dan menggerakkan kekacauan. Target dari ancaman politik ini meliputi nilai-nilai negara, terutama identitas nasional, ideologi, dan institusi yang berkaitan dengan negara. Ancaman politik secara spesifik muncul ketika terjadi bentrokan diantara dua kelompok besar dalam negara dengan pemikiran yang berbeda.
- d. Ancaman ekologi menjadi poin keamanan akibat dari masalah aktivitas manusia yang merusak lingkungan yang

berakibat pada bencana seperti banjir, longsor, pemanasan global, efek rumah kaca, banjir, eksplorasi sumber daya alam secara besar-besaran dan terus menerus.

- e. Ancaman ekonomi yang membahas keamanan masalah pengangguran, kemiskinan, keterbatasan terhadap sumber daya, dan daya beli rakyat dan persaingan yang tidak sehat dan ketidakpastian antara pelaku-pelaku pasar.

Mengambil keputusan dalam menentukan sikap maupun tindakan merupakan kriteria penting yang dilakukan dalam rangka memenuhi kepentingan nasional untuk dapat mencapai kesejahteraan baik dalam ekonomi maupun keamanan negara (Oppenheim, 1987). Menurut K.J Holsti kepentingan nasional mencakup empat unsur, yakni:

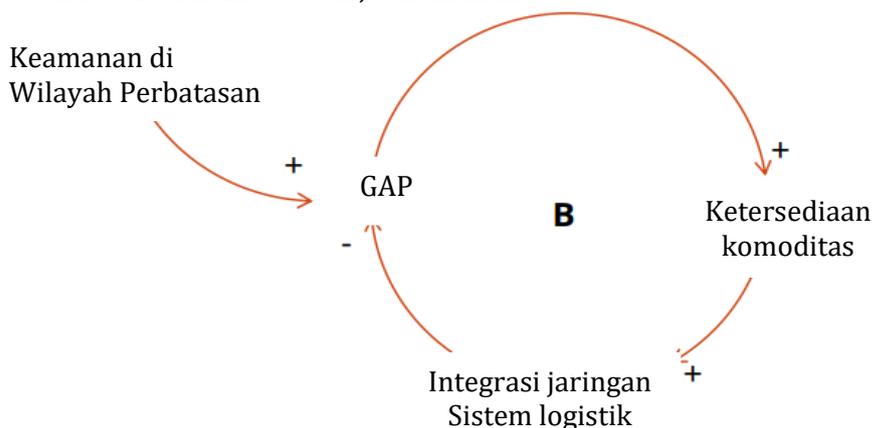
- a. *Security* (Keamanan). Tujuan utama dari setiap negara untuk mempertahankan diri (*Self Defence*), dalam artian untuk melindungi penduduk, wilayah, kedaulatannya dari ancaman yang membahayakan dan bukan hanya dalam perang dan juga hal yang bersifat fisik saja, namun juga termasuk dalam hal penduduk pemerintah, ekonomi dan ideologi.
- b. *Autonomy* (Otonomi), Otonomi merupakan kemampuan dalam memformulasikan kebijakan domestik maupun luar negeri didasarkan kepada prioritas pemerintah sendiri dan segala resikonya, serta kemampuan dalam menahan segala pengaruh, tekanan, hingga ancaman dari negara lain.
- c. *Welfare* (Kesejahteraan), Kesejahteraan menjadi salah satu faktor yang menjadi tolak ukur dalam menentukan keberhasilan suatu negara. Salah satu contohnya berupa negara akan disebut kelompok negara yang kurang baik tidak akan memperhatikan

kesejahteraan rakyatnya meskipun negara memiliki kekuatan militer besar. Namun negara yang baik akan senantiasa memperhatikan kesejahteraan rakyatnya mesti negara memiliki kekuatan militer kurang kuat.
d. *Prestigious* (Prestis)

Pandangan tradisional dalam kekuatan militer dianggap sebagai sumber utama selain peran penting dari keunggulan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh adalah upaya yang dilakukan oleh negara-negara semi-periferi untuk menjadi negara pusat, negara berkembang atau pinggiran untuk menjadi negara maju atau semi-periferi.

Agar lebih memahami hubungan antara variabel dalam sistem, dilakukan

pendekatan system thinking digunakan untuk menggambarkan hubungan sebab akibat antara faktor-faktor yang saling memberikan dampak terhadap keamanan di wilayah perbatasan. Systems thinking sendiri merupakan cara memandang sesuatu hal secara keseluruhan, dimana setiap bagiannya saling berhubungan untuk dapat memahami dan mempelajari setiap bagian yang saling berkaitan dalam suatu sistem. System thinking dapat menghasilkan model yang sering disebut sebagai causal loop diagram (CLD) yang keduanya menggunakan system dynamic. Dalam metode sistem dynamics peneliti dapat memasukkan aspek lingkungan diluar organisasi untuk dapat turut diperhitungkan sebagai faktor sebab dan akibat.



Gambar 1. Diagram archetype Balancing Loop keamanan di wilayah perbatasan.

Keamanan di wilayah perbatasan merupakan kondisi yang perlu untuk di capai oleh Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Namun saat ini kondisi keamanan Indonesia masih terdapat GAP yang dapat minimalisir dampaknya dengan ketersediaan komoditas logistik di wilayah perbatasan untuk dapat meningkatkan jaringan sistem logistik yang terintegrasi.

Keamanan yang perlu dijaga mencakup mencakup segala aspek mengenai keamanan global (global security), keamanan regional (regional security), keamanan dalam negeri (internal

security), keamanan dan ketertiban masyarakat (public security and good order), dan keamanan manusia (human security).

Dilihat berdasarkan perspektif keamanan, kondisi wilayah Indonesia di daerah perbatasan saat ini berada pada tahap yang mengkhawatirkan, kondisi ini ditandai dengan timbulnya berbagai masalah perbatasan seperti permasalahan pelintas batas negara, kasus Blok Ambalat yangtelah bergulir sejak tahun 1969, kasus Pulau Bidadari. Dilihat secara geografis daerah perbatasan darat merupakan

daerah yang terpencil dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menjadi seolah-olah terpinggirkan oleh negara dari segala aspek. Kondisi ini menjadikan wilayah perbatasan memiliki potensi ancaman dari aspek internal maupun aspek eksternal.

Beberapa permasalahan lain yang dihadapi daerah perbatasan darat negara antara lain belum tuntasnya kesepakatan perbatasan antar negara, kerusakan tanda-tanda fisik perbatasan dan belum tersosialisasinya secara baik batas negara kepada aparat pemerintah dan masyarakat. Adanya kesenjangan kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi maupun sosial. Wilayah perbatasan Indonesia yang memiliki jarak yang jauh dan luas dari pusat pemerintahan Propinsi dan Kabupaten, berakibat pada keterbatasan aksesibilitas sehingga menjadikan sulitnya melakukan pembinaan, pengawasan dan pengamanan wilayah. Keempat, penyebaran penduduk yang tidak merata dengan kualitas SDM yang rendah.

Kondisi ini diperparah dengan eksploitasi sumberdaya alam yang tidak terkendali khususnya hutan secara legal maupun ilegal yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup. "Lemahnya penegakan hukum serta kesenjangan ekonomi antar wilayah di negara yang berbatasan mendorong terjadinya kegiatan ilegal di daerah perbatasan darat seperti perdagangan ilegal, lintas batas ilegal, penambangan ilegal dan penebangan hutan ilegal." (Rani, F. 2012).

Ditinjau dari perspektif Keamanan Manusia (Human Security) paradigma pembangunan wilayah Perbatasan saat ini berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merupakan salah satu alat ukur yang terdiri dari indikator pendidikan, kesehatan, dan daya beli.

Dari aspek internal kesadaran nasional (nasionalisme) masyarakat yang rendah tentunya menjadi pilar yang tidak dapat diandalkan dalam menjaga keamanan wilayah masyarakat perbatasan darat yang terpencil, miskin dan terpinggirkan sehingga dapat membahayakan eksistensi negara. Dari aspek eksternal, warga negara Indonesia maupun pihak luar dapat dengan mudah untuk masuk ke wilayah NKRI dikarenakan wilayah perbatasan merupakan wilayah terbuka, sehingga apabila wilayah perbatasan tidak diamankan secara baik, dapat membahayakan kedaulatan NKRI. (Rani, F. 2012)

Wawasan kebangsaan merupakan landasan visional dalam membetuk ketahanan nasional Indonesia, dan memiliki berbagai makna penting bagi bangsa Indonesia yaitu (Markijar, 2017:1).

- a. Wawasan kebangsaan mengamankan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan individu atau golongan.
- b. Wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang licik.
- c. Wawasan kebangsaan selalu mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika dengan tetap mengembangkan persatuan Indonesia.
- d. NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin, sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju.

Pembahasan

Jaringan Logistik

Menjamin ketersediaan komoditas pokok dan strategis di seluruh wilayah Indonesia dengan harga yang terjangkau sehingga mendorong pencapaian masyarakat adil dan makmur, dan

memperkokoh kedaulatan dan keutuhan NKRI merupakan salah satu tujuan pengembangan Sistem Logistik Nasional sampai tahun 2025. Kondisi ini dilakukan untuk kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitar, dan memperkuat kondisi ketahanan masyarakat dalam pertahanan negara.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara mempunyai fungsi sebagai penangkal setiap bentuk ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri berupa ancaman militer dan ancaman bersenjata yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Suatu operasi TNI tidak dapat dipisahkan dari strategi, logistik dan taktik yang telah menjadi satu kesatuan. Dukungan logistik terpadu di suatu pangkalan sangat berpengaruh terhadap hasil operasi yang telah di laksanakan, dukungan ini dapat berupa dukungan pemeliharaan, dukungan perbekalan, dukungan personil, pendidikan dan latihan, serta dukungan fasilitas pangkalan. Dengan dukungan logistik yang memadai bagi personel maupun peralatan yang digunakan akan sangat menunjang tercapainya kemenangan.

Dalam menjamin kebutuhan masyarakat di perbatasan dan kebutuhan keamanan maka dibutuhkan sistem logistik yang terintegrasi. Sistem jaringan logistik yang terjadi di perbatasan Indonesia memiliki kondisi yang memprihatinkan karena pergerakan logistik belum dapat dijangkau ke seluruh wilayah yang menimbulkan logistik hanya terhenti di pusat kota atau kecamatan. Untuk dapat memperoleh sistem logistik yang terintegrasi maka perlunya dikembangkan menggunakan konsep supply chain management yang berkolaborasi dengan berbagai pihak dan dukungan dukungan dari berbagai pihak dari pelaku hingga

pengguna sehingga tercipta sistem yang tersinkronisasi dan profesional.

Konsep supply chain management yaitu serangkaian jaringan dalam memproduksi bahan baku dan mengubahnya menjadi barang setengah jadi maupun barang produk akhir, dan mengirimkan produk kepada pelanggan melalui sistem distribusi. Tujuan utama rantai pasok berupa penyerahan atau pengiriman produk demi memuaskan konsumen yang dilakukan secara tepat waktu. Dengan menjadikan para pemasok sebagai rekan kerja merupakan salah satu usaha untuk menjadikan manajemen rantai pasok yang efektif dalam strategi perusahaan (Sarwoko, 2019).

Manajemen logistik membahas mengenai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pihak manajemen, termasuk di dalamnya ada planning, implementation, dan controlling yang mengubah sejumlah bahan baku menjadi produk yang dibutuhkan oleh para konsumen/pengguna akhir. Bahan baku dalam manajemen logistik meliputi sumber-sumber daya alam, sumber-sumber daya manusia, sumber-sumber daya finansial, dan sumber-sumber daya informasi.

Proses pelaksanaan bahan baku menjadi produk melibatkan serangkaian aktivitas logistik yang meliputi customer service, demand forecasting, inventory management, logistic communications, material handling, order processing, parts and service support, plant and warehouse site selection, procurement, packaging, reverse logistics, traffic and transportation serta warehousing and storage dengan tidak mengabaikan keunggulan kompetitif (competitive advantage), kegunaan waktu dan tempat (time and place utility), pergerakan yang efisien kepada konsumen (efficient movement to customer), dan aset kepemilikan (proprietary asset). (HS, T. I., & Sony, I.2016)

Logistik adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan manajemen aliran barang dan jasa antara titik asal dan titik konsumsi (Yasseri, Sumi, Rung, Kornai, & Kertész, 2012). Logistik memposisikan sumber daya pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, untuk biaya yang tepat dan untuk kualitas yang tepat (Walker & Jones, 2012). Logistik merupakan kegiatan penting yang dapat memengaruhi kebutuhan perekonomian nasional dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan material secara ekstensif.

Logistik yang dibutuhkan di perbatasan bukan hanya logistik sipil melainkan logistik militer selalu diperlukan di setiap wilayah. Peranan moda jaringan logistik yang terintegrasi merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan dalam meningkatkan keamanan di perbatasan. Dasar dalam pengelolaan rantai proses yang terintegrasi dapat dicirikan dengan adanya kerjasama, kolaborasi, berbagi informasi, kepercayaan, kemitraan, teknologi bersama, dan pergeseran mendasar dari pengelolaan proses fungsional individu. Penerapan teknologi informasi yang efektif untuk integrasi kegiatan rantai pasokan memiliki efek mengurangi tingkat kompleksitas

Dasar integrasi dapat dicirikan oleh kerjasama, kolaborasi, berbagi informasi, kepercayaan, kemitraan, teknologi bersama, dan pergeseran mendasar dari pengelolaan proses fungsional individu, ke pengelolaan rantai proses yang terintegrasi. Penerapan teknologi informasi yang efektif untuk integrasi kegiatan rantai pasokan memiliki efek mengurangi tingkat kompleksitas. Contoh dari keadaan yang kompleks secara dinamis adalah "Efek bullwhip" Gejala dari efek bullwhip adalah persediaan yang berlebihan, tingkat layanan pelanggan yang rendah, perencanaan kapasitas yang tidak akurat dan tidak tepat waktu, pendapatan yang

hilang, peningkatan biaya transportasi dan penjadwalan produksi yang tidak efektif.

Integrasi simpul logistik dan keterkaitan antar simpul menjadi landasan utama dalam mewujudkan konektivitas lokal, nasional dan global untuk menuju kedaulatan dan ketahanan ekonomi nasional (national economic authority and security) dan terwujudnya Indonesia sebagai Negara Maritim.

Tabel 1. Peringkat LPI Negara ASEAN

Sumber:

<https://smklogistiksmid.sch.id/sekolah/>

NO.	NEGARA	PERINGKAT LPI DUNIA PADA TAHUN			KETERANGAN
		2014	2016	2018	
1	Singapura	5	5	7	Turun
2	Thailand	35	45	32	Naik
3	Vietnam	48	64	39	Naik
4	Malaysia	25	32	41	Turun
5	Indonesia	53	63	46	Naik
6	Philippine	57	71	60	Turun
7	Myanmar	-	113	137	Turun
8	Kamboja	-	73	98	Turun
9	Laos	131	152	82	Naik
10	Brunei	-	70	80	Turun

Data diatas merupakan data peringkat LPI negara di Asean yang ditetapkan Bank Dunia untuk mengukur kinerja logistik sebuah negara. Dapat dilihat bahwa Indonesia masih belum menunjukkan nilai maksimum dengan masih berada pada peringkat 5 ASEAN, kondisi ini harus menjadi perhatian pemerintah secara konsisten dan beraliansi strategis dengan dunia usaha dan dunia industri, serta peningkatan kompetensi sumberdaya manusia oleh masyarakat yang memiliki kepedulian terdhadap dunia pendidikan Indonesia di bidang logistik.

Penerapan semua indikator kinerja dalam jaringan logistik penting dapat diterapkan dalam jaringan logistik total maupun pada masing-masing perusahaan. Karena perusahaan dengan membentuk jaringan logistik maka perusahaan telah mengikuti tujuan utama yang sama, indikator kinerja logistik harus sebanding dengan yang utama.

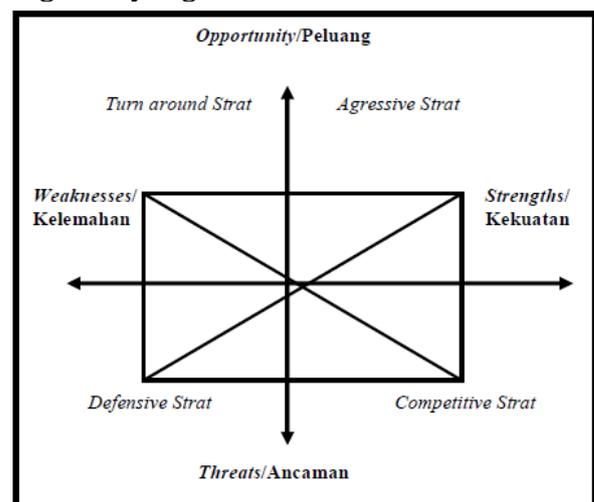
Rendahnya efisiensi distribusi di Indonesia berasal dari berbagai faktor salah satunya yaitu belum memadainya sarana dan prasarana logistik, sarana transportasi seperti jalan, pelabuhan, bandara hingga alat angkutan, sarana pergudangan dan keterampilan sumber daya manusia. Infrastruktur logistik Indonesia saat ini masih banyak menggunakan sistem yang bersifat konvensional dimana regulasi belum cukup mengatur seluruh kegiatan sektor logistik, masih bersifat sektoral dan tidak komprehensif, serta tidak diikuti oleh penegakan hukum (law enforcement). Infrastruktur yang belum memadai serta proses dan penyedia jasa logistik yang belum berkembang juga mengakibatkan lamanya waktu kirim dan berakibat tingginya biaya logistik di Indonesia sehingga mengurangi daya saing industri nasional dan rendahnya perekonomian masyarakat perbatasan, lamanya waktu kirim juga diakibatkan oleh belum terintegrasinya interconnectivity satu lokasi dengan lokasi lainnya yang menghubungkan antar pusat-pusat produksi dengan pusat-pusat konsumsi. (Mulyadi,D. 2011)

SWOT Analysis

Untuk dapat menentukan strategi yang tepat dalam mendukung keamanan di wilayah perbatasan maka dilakukan strategi SWOT yang mengadalisir berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal yang ada. Analisis SWOT merupakan cara untuk merumuskan strategi perusahaan dengan cara mengidentifikasi berbagai faktor yang ada secara sistematis. Analisis SWOT dilakukan berdasarkan pada logika untuk dapat memaksimalkan dan meningkatkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunity), dengan cara yang bersamaan dilakukan untuk dapat meminimalkan kelemahan (weakness)

serta ancaman (threats) yang timbul. Dalam proses pengambilan keputusan strategi dilakukan dengan memperhatikan dan berkaitan mengenai kebijakan perusahaan, strategi, pengembangan misi, serta tujuan (Fredri Rangkuti. 2004: 18).

Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan adalah matrik SWOT. Matrik ini terdiri dari Strategi SO, ST, WO, dan WT. Strategi SO (Strength-Opportunities) dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang yang sebesar besarnya. Strategi ST (Strenghts-Threats) merupakan strategi yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Strategi WO (Weknesses- Opportunities) menerapkan cara meminimalkan kelemahan yang ada berdasarkan pemanfaatan peluang yang dimiliki. Strategi WT (Weknesses- Threats) dilakukan untuk menghindari ancaman dengan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada berdasarkan pada kegiatan yang bersifat defensive.



Gambar 2. Perpotongan kuadran strategi IFAS dan EFAS

Strategi Agresif merupakan strategi dalam berinvestasi yang mengacu pada gaya manajemen portofolio yang mencoba untuk memaksimalkan keuntungan dan

kesempatan yang dimiliki dengan mengambil tingkat risiko relatif lebih tinggi.

Strategi diversifikasi pada kuadran competitive strategi berarti strategi yang dilakukan perusahaan dalam usaha mengembangkan usahanya melalui cabang atau unit bisnis berupa anak perusahaan baru yang dilakukan dalam lingkup bisnis yang sama maupun lingkup usaha bisnis yang berbeda.

Strategi Defensif merupakan strategi bertahan perusahaan yang bertujuan mengurangi kemungkinan ancaman yang datang dari pesaing, membelokkan serangan ke arah yang tidak membahayakan atau mengurangi intensitasnya.

Strategi turnaround berarti strategi yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mengembalikan perusahaan dari kondisi penurunan prestasi ke kondisi berlabar (Jane, 2000).

a. Swot Analysis

Penentuan faktor-faktor internal dan eksternal yang dimiliki yaitu:

- Kelebihan yang dimiliki dalam meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan adalah sumber daya yang melimpah dalam berbagai sektor, Prajurit TNI yang selalu siap menjaga keamanan di perbatasan, Letak geografis yang strategis.

Kelebihan lain yang dimiliki masyarakat di perbatasan adalah perdagangan perbatasan diberikan pembebasan bea masuk, bea keluar dan pajak dalam rangka impor dengan negara yang ada di perbatasan, pengecualian dari ketentuan pembatasan ekspor dan impor pada tempat atau wilayah tertentu, dan pengecualian dari ketentuan tata niaga impor di luar kawasan pabean (post border) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kekurangannya yaitu kurangnya pengelolaan sumber daya yang dimiliki masyarakat, jaringan transportasi logistik belum berintegrasi, Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah
- Kesempatan yang dimiliki berupa dukungan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan keamanan di perbatasan dengan mengirimkan prajurit TNI yang ada di setiap perbatasan.
- Tantangan yang harus dihadapi adalah terkikisnya nasionalisme masyarakat di perbatasan akibat dari mudahnya interaksi dengan negara tetangga, anggaran yang tinggi dalam meningkatkan infrastruktur dan moda transportasi yang layak di perbatasan.

Tabel 2. Faktor Internal

IFAS					
No	Strengths	Tingkat	Bobot	Rating	Total
1	Sumber daya yang melimpah dalam berbagai sektor	3	0,300	3	0,9
2	Prajurit tni yang selalu siap menjaga keamanan di perbatasan	3	0,300	3	0,9
3	Pembebasan bea keluar, bea masuk, dan pajak	2	0,200	2	0,4
4	Kemajuan teknologi	2	0,200	3	0,6
Jumlah		10	1,000		2,8

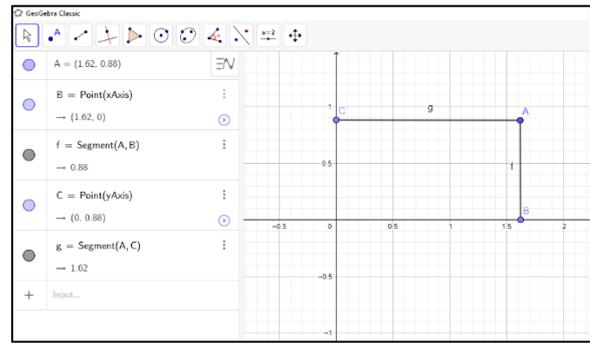
No	Weakness	Tingkat	Bobot	Rating	Total
1	Kurangnya pengelolaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia	3	0,273	1	0,273
2	Jaringan sarana dan prasarana logistik belum berintegrasi	3	0,273	1	0,273
3	Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah	2	0,182	2	0,364

4	kinerja logistik Indonesia masih rendah	3	0,273	1	0,273
JUMLAH		11	1,000	5	1,182
TOTAL					1,618

Tabel 3. Faktor Eksternal

EFAS					
No	Opportunities	Tingkat	Bobot	Rating	Total
1	Dukungan pemerintah dalam meningkatkan keamanan wilayah	3	0,273	3	0,818
2	Program pembinaan kesadaran bela negara	3	0,273	2	0,545
3	Kebijakan pemerintah dalam pemerataan daerah	3	0,273	3	0,818
4	Manajemen strategis oleh semua pihak	2	0,182	2	0,364
JUMLAH		11	1,000		2,545

No	Threat	Tingkat	Bobot	Rating	Total
1	Terkikisnya nasionalisme masyarakat di perbatasan akibat dari mudahnya interaksi dengan negara tetangga	3	0,333	1	0,333
2	Anggaran yang tinggi dalam meningkatkan infrastruktur moda transportasi yang layak di perbatasan	3	0,333	2	0,667
3	Radikalisme, ekstrimis yang tidak dipadamkan dan berusaha mempengaruhi kalangan muda	3	0,333	2	0,667
JUMLAH		9	1,000		1,667
TOTAL					0,879



Gambar 3. Titik Koordinat Total IFAS dan EFAS
 Sumber: Diolah penulis

Berdasarkan hasil analisis faktor internal dan eksternal dalam mendukung keamanan di wilayah perbatasan didapatkan hasil strategi yang tepat berada di kuadran I dengan kategori strategi SO (strength - Opportunities) dengan nilai total IFAS sebesar 1,62 dan nilai total EFAS sebesar 0,88. Hal ini menandakan keadaan positif yang dimiliki berupa kekuatan dapat terus dikembangkan untuk mengurangi potensi ancaman dan meningkatkan kinerja.

Perencanaan untuk Logistik dilakukan sesuai dengan hierarki tertentu yang mencerminkan rentang waktu perencanaan yang berbeda. Langkah yang dapat dilakukan dapat dimulai dengan membangun Logistic Center di berbagai lokasi yang tepat guna memperkuat operasionalisasi transportasi multimoda, karena keberadaan Logistic Center mampu mempersiapkan komoditi yang akan diangkut.

Adanya Logistic Center akan memberikan nilai tambah logistik karena mampu memberi kemanfaatan mencakup penyimpanan (inventory), pemeriksaan (inspection), pelabelan (labeling), pengepakan (packaging), penjemputan (order picking), pemberian kode (barcoding), pengembalian (return), keperluan kepabeanaan (customizing) sehingga akan meningkatkan dalam tugas penyerahan barang serta dalam pendistribusian. Logistic Center dimaksud

lebih tepat berada di dekat pelabuhan, terkoneksi ke terminal kontainer, kapasitas kapal kontainer besar, kesiapan pelabuhan, tersedianya komoditi utama, teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir serta mampu menciptakan sinergisitas tinggi dalam mewujudkan visi logistik Indonesia 2025. (HS, T. I., & Sony).

Dengan jaringan transportasi yang baik akan menunjang lancarnya jaringan logistik ke perbatasan, baik itu logistik militer sebagai kebutuhan TNI ataupun logistik sipil sebagai penunjang meningkatkan perekonomian masyarakat di perbatasan. Transportasi multimoda menjadi salah satu indikator penting dalam melancarkan sistem logistik karena mampu berperan sebagai tulang punggung yang dapat meningkatkan utilitas barang baik dalam transportasi bahan mentah, transportasi pengolahan maupun transportasi distribusi barang konsumsi namun peran tersebut belum optimal.

Kemajuan yang dibuat dalam bidang teknologi informasi, memungkinkan terjadinya pengembangan sistem informasi yang canggih untuk mendukung dan meningkatkan perencanaan dan manajemen operasi logistik, di mana pengumpulan dan analisis data yang sangat terperinci dapat dilakukan yang belum tentu dilakukan sebelumnya.

Kebijakan pertahanan negara mengacu pada visi dan misi pemerintah yang diwujudkan secara proporsional, seimbang dan terkoordinasi. Kebijakan pertahanan negara diimplementasikan melalui berbagai upaya dalam pengelolaan sumber daya dan sarana. Kondisi sumber daya manusia juga menjadi hal penting yang menjadi faktor pendukung peningkatan jaringan rantai pasok yang terintegrasi.

Dukungan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan keamanan di perbatasan dengan mengirimkan prajurit TNI yang ada di

setiap perbatasan upaya lain dilakukan dengan peningkatan kualitas pengawasan di pos-pos lintas batas terhadap lalu lintas barang dan orang dengan penambahan pos-pos pengawasan dan personil di pos lintas batas. Dukungan yang diberikan pemerintah berupa upaya memperkuat peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan, memaksimalkan peran kementerian dan lembaga terkait, memperkuat peran TNI, serta memperkuat peran pemerintah daerah.

Meningkatkan perekonomian pusat perbatasan, mengembangkan dan memperkuat konektivitas berbagai sektor yang terintegrasi untuk memperlancar alian logistik, membentuk lembaga sektor logistik untuk menghasilkan sumber daya manusia yang potensial dan meningkatkan kapasitas saran dan prasarana logisti terintegrasi maka perlunya dikembangkan menggunakan konsep supply chain management.

Melakukan program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) kepada masyarakat sejak dini agar rasa nasionalisme dan rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air terus tercipta dalam diri setiap warga negara.

Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang kita terhadap diri sendiri sebagai bangsa yang harus mencerminkan rasa dan semangat kebangsaan (karakter bangsa) dan mampu mempertahankan jati dirinya sebagai bangsa yaitu Pancasila. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi kesatuan wilayah, bangsa dan negara memandang Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi daratan dan lautan secara tidak terpisahkan. kesatuan tanah dan air yang terkandung dalam konsepsi nusantara, merupakan wadah fisik bagi pengembangan wawasan nusantara dalam pengelolaan perbatasan yaitu konsep persatuan dan kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika, kebangsaan, negara kebangsaan, negara kepulauan dan geopolitik.

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu upaya dalam penguatan wawasan kebangsaan bagi masyarakat perbatasan Indonesia, sehingga mampu untuk berpikir kritis, bertanggung jawab, serta memiliki wawasan kebangsaan yang baik dan mampu menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KESIMPULAN

Kondisi wilayah perbatasan Indonesia saat ini masih jauh dari kata layak, sulitnya akses dalam pemerataan logistik ke daerah perbatasan sehingga tingginya tingkat kesenjangan pembangunan wilayah dibandingkan dengan wilayah lain. Potensi lainnya adalah rentan adanya konflik yang mengganggu keamanan di wilayah perbatasan. Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan utama negara sangat dibutuhkan dalam menghadapi ancaman yang terjadi

hususnya di perbatasan. Dalam menjamin kebutuhan masyarakat di perbatasan dan kebutuhan keamanan maka dibutuhkan sistem logistik yang terintegrasi. Sistem jaringan logistik yang terjadi di perbatasan Indonesia memiliki kondisi yang memprihatinkan karena pergerakan logistik belum merata.

Langkah yang dapat dilakukan dapat dimulai dengan membangun Logistic Center di berbagai lokasi yang tepat guna, mengembangkan dan memperkuat konektivitas berbagai sektor yang terintegrasi untuk memperlancar alian logistik,

Dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin canggih diharapkan permasalahan jaringan logistik dapat segera dibenahi, langkah yang telah diambil adalah dengan adanya tol laut dan meningkatkan integrasi hingga ke daerah perbatasan untuk menekankan logistik merata di berbagai wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. Pembinaan Bela Negara Terhadap Masyarakat Di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Indonesia Yang Tangguh Dan Sejahtera. *Universitas Pertahanan*.
- Azmi, K. A. W. P. N. Dalam Rangka Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Terjaga di Lingkungan Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah. *Dalam Jurnal*, 6.
- Bria, M. E. (2017). Penguatan Wawasan Kebangsaan Peserta Didik di Daerah Perbatasan Indonesia-Timor Leste melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III p-ISSN, 2598, 5973*.
- Bastuti, S., Alfatiyah, R., Shobur, M., & Candra, A. (2019). Manajemen Logistik.
- Daturatte, S. R., Jinca, M. Y., & Wunas, S. (2010). Sistem Jaringan Transportasi Logistik Kawasan Perbatasan Provinsi Papua Dengan Papua New Guinea. *Jurnal Transportasi*, 10(3).
- Direktorat Jendral Strategi Pertahanan. 2007. BAB, I. OPTIMALISASI PENANGANAN WILAYAH PERBATASAN MARITIM RI-RDTL DALAM RANGKA MENJAGA KEUTUHAN NKRI.
- Evanty, N. (2017). Urgensi Undang-Undang Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 34(2), 121-128.
- Freddy Rangkuti, 2004, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, PT. Graedia, Jakarta
- Hs, T. I., & Sony, I. Kajian Peningkatan Peranan Transportasi Multimoda Dalam Mewujudkan Visi Logistik Indonesia 2025. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik*, Vol. 3 No. 1
- Indonesia, R. (2012). Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional.

- Jinca, M. Y., & Muliama, A. (2017). Simpul Jaringan Transportasi Logistik Di Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia Di Kabupaten Nunukan. *Jurnal Transportasi Multimoda*, 14(4), 207-216.
- Peraturan Presiden Republik Indonesianomor 26 Tahun 2012 Tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional.
- Poespowardojo, S. (2003). Dinamika Dan Implikasi Etis Wawasan Kebangsaan Dalam Menyongsong Hari Depan Indonesia. *Jurnal Ketahanan Indonesia*. 8 (2), 1-6.
- Mawanto, A. (2020). Pengaruh Dukungan Logistik Terpadu di Wilayah Natuna terhadap Kesiapan Operasi KOGABWILHAN I. *Jurnal Logistik Indonesia*, 4(2), 146-153.
- Mulyadi, D. (2011). Pengembangan Sistem Logistik Yang Efisien Dan Efektif Dengan Pendekatan Supply Chain Management. *Journal Of Industrial Research (Jurnal Riset Industri)*, 5(3), 275-282.
- Markijar. (2017). Wawasan Kebangsaan Indonesia. Diunduh 28 Oktober 2017, from: <http://www.markijar.com/2017/06/wawasankebangsaan-indonesia-lengkap.html>.
- Nisak, Z. (2013). Analisis SWOT untuk menentukan strategi kompetitif. *Jurnal Ekbis*, 9(2), 468-476.
- Oppenheim, Felix E., (1987). "National Interest, Rationality, and Morality", *Political Theory*, Vol. 15, No. 3; pp. 369-389.
- Rani, F. (2012). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Menurut Perspektif Sosial Pembangunan. *Transnasional*, 4(01).
- Susantono B. Roadmap Transportasi Indonesia. Jakarta, 2007.
- Sarwoko, W. (2019). Grafik Peningkatan Penduduk. 2.
- Walker, H., & Jones, N. (2012). Sustainable supply chain management across the UK private sector. *Supply Chain Management*, 17(1), 15-28. <https://doi.org/10.1108/13598541211212177>
- Yasseri, T., Sumi, R., Rung, A., Kornai, A., & Kertész, J. (2012). Dynamics of conflicts in wikipedia. *PLoS ONE*, 7(6), 1-12. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0038869>
- Zed, Mestika, (2003), "Metode Penelitian Kepustakaan", Jakarta: Yayasan Obor Indonesia <https://smklogistiksmid.sch.id/sekolah/> Diakses tanggal 21 April 2022